

ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN NEW NORMAL DALAM MENEKAN PERKEMBANGAN KLASTER COVID-19 DI PASAR TRADISONAL PANORAMA KOTA BENGKULU

Oleh:
Siti Laila Rahmi, Djonet Santoso, Jatmiko Yogopriyatno.
Jurusan Administrasi Publik
Universitas Bengkulu

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan new normal di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Untuk menganalisis peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dimana terdapat tiga aktivitas yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan new normal normal di Pasar Panorama Kota Bengkulu belum berjalan optimal. Pertama, ditinjau pada aspek organisasi dalam pelaksanaannya sudah sesuai sebagaimana mestinya dimana organisai yang ditetapkan yaitu satgas penanganan Covid-19 berjalan dengan baik dalam merealisasikan kebijakan new normal. Pada aspek interpretasi tidak berjalan baik. Dapat dilihat bahwasanya dari segi pemahaman masyarakat memahami tetapi mereka tidak menerima dengan baik kebijakan tersebut sehingga mempengaruhi mereka dalam bersikap sebagai respon dari kebijakan new normal. Terakhir, pada aspek aplikasi juga tidak berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaannya masyarakat sebagai target sasaran tidak menerapkan kebijakan new normal dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang merupakan tujuan dari pelaksanaan kebijakan new normal di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Kata Kunci : Covid-19, New Normal, Satgas Penanganan Covid-19

The purpose of this study is to examine how the new normal policy has been implemented at Bengkulu's Panorama Market. The researcher used the policy implementation theory, which identifies three activities: organization, interpretation, and application. This study employs a descriptive qualitative approach. Purposive sampling was employed to choose the informants. The findings revealed that the implementation of the new normal normal policy in Bengkulu City's Panorama Market had not gone well. First, in terms of organizational factors, the implementation is on track, with the Covid-19 handling task group doing admirably in implementing the new usual policy. It did not go well when it came to interpretation. It can be observed that the community knows the policy, but they do not accept it, causing them to react to the new usual regulation. Finally, the program is not performing at its best. This can be regarded in the community as a target for not adopting the new normal policy in everyday activities, which is the objective of implementing the new normal policy at Bengkulu City's Panorama Market.

keywords : Covid-19, New Normal, Satgas Penanganan Covid-19

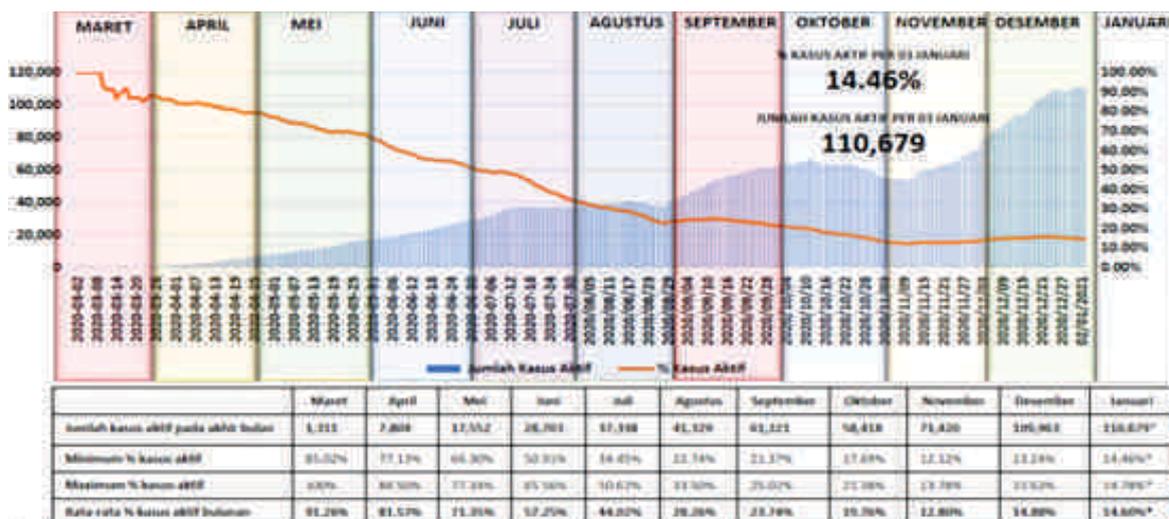
A B S T R A C T

A. LATAR BELAKANG

Virus corona yang pertama kali muncul dan menyebar ke manusia berasal dari Kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di Kota Wuhan. Kemudian ditemukan banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang di pasar wuhan tersebut. Di pasar wuhan begitu banyak menjual hewan liar seperti ular dan kelelawar sehingga diduga virus ini berasal dari hewan-hewan tersebut. Penyebaran setelah ditemukan kasus Covid-19 di China terus berkembang di berbagai Negara di belahan dunia.

Perkembangna Covid-19 di Indonesia dimulai pada 2 Maret 2020, adanya kasus pertama positif Covid-19 yaitu dua orang WNI dikonfirmasi terinfeksi virus corona. Kedua pasien positif tersebut merupakan ibu berusia 64 tahun dan putrinya berusia 31 tahun. Meski disebut kasus pertama, setelah 39 hari kemudian tepatnya pada 9 April 2020, virus corona dinyatakan telah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Sejak saat ini perkembangan Virus Covid-19 terus bertambah hingga setelah 10 bulan terhitung dari awal kasus pertama covid-19 yaitu pada akhir tahun 2020 yaitu tertanggal 31 Desember 2020 total Kasus positif Covid-19 bertambah 8.074 menjadi 743.198 kasus. Pasien sembuh bertambah 7.356 menjadi 611.097 orang. Pasien meninggal bertambah 194 menjadi 22.138 orang.

Grafik1
Jumlah Persentase Kasus Aktif di Tingkat Nasional Pada Tahun Pertama

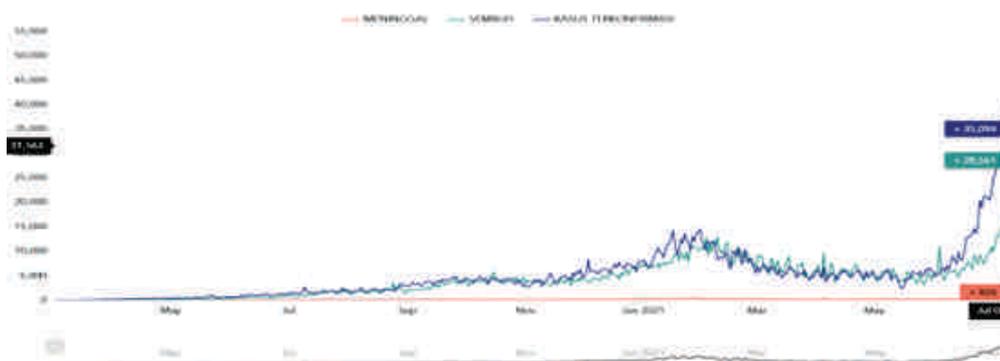


Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional

Penyebaran Covid 19 sejak pertama kali ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020 hingga 02 Januari 2021 masih tetap bertambah meski jumlahnya tidak sebanyak dari bulan pertama ditemukan

Hal ini merupakan catatan buruk bagi pemerintah Indonesia karena kasus yang masih selalu bertambah setelah melewati 10 bulan semenjak ditemukannya kasus Covid-19. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa kasus aktif yang didapat pada tanggal 2 Januari tepat 10 bulan semenjak ditemukannya kasus covid sekitar 14,46 % dan total jumlah kasus terus bertambah dari pertama ditemukannya kasus Covid-19 berjumlah 110,679 kasus aktif. Jumlah kasus covid selalu ada penambahan setiap minggunya yang membuat angka kasus Covid-19 tidak stabil setiap bulannya.

Grafik 2
Perkembangan Kasus Covid-19 Pada Tahun Kedua(Januari – Juli 2021)

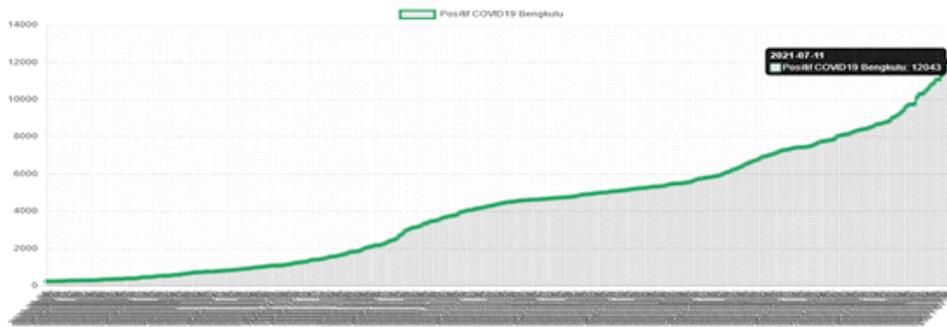


Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional

Dalam perkembangannya, hingga saat ini sudah memasuki tahun kedua kasus Covid 19 selalu mengalami penambahan di setiap harinya di setiap provinsi di Indonesia. Data yang menunjukkan kenaikan terutama pada bulan Juli mengalami kenaikan yang signifikan apabila dibandingkan pada awal bulan Januari 2021. Penambahan ini menandakan bahwa pandemi covid 19 bukanlah suatu hal yang mudah ditangani oleh pemerintah Indonesia, itulah mengapa pemerintah Indonesia menetapkan pandemi penyakit virus corona Covid-19 sebagai bencana non alam. Penetapan status ini merujuk pada UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, nonalam dan sosial.

Perkembangan kasus covid selalu bertambah di setiap provinsinya tak terkecuali di Kota Bengkulu. Perkembangan kasus Covid-19 di Bengkulu tetap saja grafik penyebaran Covid-19 terus bertambah hal itu dapat dilihat dari perbandingan antara akhir tahun 2020 hingga memasuki tahun kedua perkembangan kasus Covid-19 pada tanggal 04 Juli 2021. Pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat 3.601 kasus positif Covid, sebanyak 116 kasus sembuh dan 116 kasus meninggal dari Covid-19 sedangkan tanggal 04 Juli 2021 terlihat peningkatan kasus Covid yaitu tercatat 10.777 kasus positif Covid, sebanyak 8.957 kasus sembuh dan 227 kasus meninggal dari Covid-19. Angka pencapaian buruk ini tercatat dari berbagai daerah di Kota Bengkulu.

Grafik 3
Perkembangan Kasus Covid-19 Dari Bulan Agustus 2020 - Juli 2021 di Provinsi Bengkulu



Sumber: Covid-19 Provinsi Bengkulu

Berdasarkan website Covid-19 provinsi Bengkulu dapat dilihat bahwa angka perkembangan kasus Covid-19 di Bengkulu selalu bertambah dimulai dari tanggal 4 Agustus 2020 dengan jumlah positif Covid-19 sebanyak 238 hingga tanggal 11 Juli 2021 kasus positif Covid-19 mencapai total 12.043 kasus positif.

Gambar 1
Jumlah Persebaran Kasus Covid-19 Pada Tanggal 07 Juli 2021 di Provinsi Bengkulu



Sumber: Covid-19 Provinsi Bengkulu

Peta sebaran kasus Covid-19 yang didapat dari website resmi Covid19 provinsi Bengkulu menjelaskan perkembangan kasus Covid-19 di Kota dan kabupaten Provinsi di Bengkulu yang telah memasuki tahun kedua dari terkonfirmasi kasus positif Covid-19. Catatan kasus Covid-19 paling buruk terletak pada Kota Bengkulu itu sendiri dengan penemuan kasus Covid-19 terbanyak dari kabupaten lainnya dengan jumlah kasus pada tanggal 11 Juli 2021 dengan jumlah konfirmasi :5783 kasus, meninggal 131 kasus dan sembuh sembuh 4656 kasus sedangkan suspek 7448 kasus. Buruknya angka perkembangan Covid-19 di Kota Bengkulu dari pada Kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu, membuat Pemkot Kota Bengkulu harus lebih ekstra dalam menangani kasus Covid-19 di Kota Bengkulu.

Melihat perkembangan kasus Covid-19 yang selalu merangkak naik dan menjadi permasalahan besar di Indonesia karena memberikan dampak buruk dalam berbagai aspek terutama aspek perekonomian. Adanya pandemi Covid-19 yang penyebarannya begitu mudah hanya dengan melakukan kontak fisik saja membuat masyarakat harus membatasi interaksi sosial secara langsung. Hal ini membatasi ruang gerak masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal dalam menekan kasus Covid-19 ini dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga new normal yang dicanangkan oleh pemerintah. New normal adalah sebuah perubahan budaya hidup yang dicanangkan pemerintah Republik Indonesia agar masyarakat dapat terbiasa dengan tatanan hidup normal yang baru untuk menghadapi penyebaran virus corona. Istilah new normal lebih menitik beratkan perubahan budaya masyarakat untuk terbiasa berperilaku hidup sehat. Dalam kebijakan new normal sudah ditetapkan oleh pemerintah standar kesehatan atau protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh masyarakat diantaranya beraktivitas, bekerja menyesuaikan dengan protokol kesehatan seperti menggunakan handsanitizer serta masker diluar ruangan, mengurangi kontak fisik dengan orang lain, dan menghindari kerumunan dan sebagainya. Sejauh ini daerah-daerah di Indonesia telah membuat aturan terkait penerapan new normal sambil terus melakukan upaya pencegahan COVID-19. Masyarakat diharapkan mengikuti aturan tersebut dengan selalu menerapkan protokol kesehatan agar bisa menekan perkembangan Covid-19 di Indonesia

Pelaksanaan New Normal di Indonesia, pemerintah telah membuat peraturan perundang undangan mengenai pelaksanaan covid tersebut. Implementasi new normal diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 diatur bagaimana protokol kesehatan dalam jalannya pelaksanaan New Normal di tengah masyarakat baik dari fasilitas umum, karyawan, aparat sipil hingga pelaku usaha. Untuk membantu pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menekan perkembangan Covid-19 pemerintah telah membuat satuan tugas penanggulangan covid-19 (Satgas Covid-19). Pembentukan Satgas Covid-19 ini ditetapkan dalam Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-1 yang ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2020.

Setelah berjalannya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 presiden membubarkan dan mengubahnya menjadi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 menteri Dalam Negeri mengeluarkan aturan yang menjadi dasar pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan

Covid-19 di tiap daerah maka pemerintahan daerah dapat menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 dan dapat segera mengambil langkah – langkah kebijakan strategis yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di daerah sehingga pelaksanaan penanganan menjadi efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Perkembangan Kasus Covid-19 berdampak besar terhadap masyarakat Indonesia termasuk dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan diperlakukannya kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus seperti lockdown, social distancing hingga PSBB hingga new normal, yang dipaparkan oleh Rahmadanik, D., Ria, CAK. (2022:86). Penerapan New Normal sebagai salah satu langkah menekan perkembangan pandemi Covid- di Bengkulu sudah mulai dilaksanakan mulai dari tanggal 15 Juni 2020. Dalam hal ini pemerintah Kota Bengkulu telah mempersiapkan penerapan tatanan normal baru, termasuk mengencangkan sosialisasi mengenai adaptasi terhadap kebiasaan baru untuk mencegah penularan COVID-19. Pelaksanaan New Normal ini juga diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 mencakup pelaksanaan, monitoring serta evaluasi, sanksi, sosialisasi serta partisipasi dan pendanaan.

Kota Bengkulu merupakan tempat yang memiliki resiko paling tinggi penyebaran pandemi Covid-19 daripada kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu. Salah satu tempat yang menjadi klaster perkembangan pandemi Covid-19 di Kota Bengkulu adalah pasar. Senada yang dipaparkan oleh Puspanigtys (2021:20) bahwa dampak Covid-19 yang paling terasa adalah pada aktivitas perekonomian dimana kebutuhan sehari-hari masyarakat perlu dilakukan. Aktivitas ekonomi yang dimaksud adalah kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi barang dan/atau jasa. Itulah mengapa pasar menjadi tempat yang berisiko tinggi dalam penyebaran pandemi Covid-19 selain itu penularan Covid-19 yang sangat mudah hanya dengan melalui kontak langsung dengan mereka yang terjangkit virus tersebut maka virus tersebut akan berpindah satu sama lain sehingga keramaian merupakan tempat yang rawan berkembangnya virus Covid-19 ini. Pasar yang menjadi target penelitian yang akan peneliti teliti adalah pasar Panorama Kota Bengkulu. Dipilihnya pasar panorama Kota Bengkulu dikarenakan ditemukannya kasus Covid-19 di pasar Panorama tersebut. Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa pasar tradisional Panorama di Kota Bengkulu menjadi klaster baru penularan virus corona jenis baru setelah salah satu penjahit di pasar itu terkonfirmasi positif COVID-19. Kasus konfirmasi positif COVID-19 yang pertama ditemukan di Pasar Panorama Kota Bengkulu, yakni kasus nomor 101 yang merupakan perempuan berusia 48 tahun. Kasus ini diumumkan oleh tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Provinsi Bengkulu pada 14 Juni 2020. Sebelumnya, tim GTPP COVID-19 Kota Bengkulu pada tanggal 22 Juni 2020 melakukan tes cepat kepada para pedagang di Pasar Panorama

usai ditemukannya virus corona jenis baru menyasar pasar tersebut. Dari 38 orang yang dites ada tujuh pedagang yang hasilnya reaktif, namun hanya satu pedagang yang mengeluhkan batuk dan flu.

Gambar 2
Situasi Masyarakat Di Pasar Panorama



Sumber: olahan peneliti

Dilihat dari situasi pasar panorama yang merupakan salah satu tempat yang ramai dan menjadi salah satu tempat yang rawan dalam penyebaran pandemi Covid-19 banyaknya masyarakat yang tidak patuh dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Banyaknya masyarakat yang mengacuhkan protokol kesehatan menjadi salah satu penyebab tingginya penyebaran pandemi Covid-19 di Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian yang peneliti lakukan teridentifikasi dua permasalahan dalam pelaksanaan new normal di pasar panorama Kota Bengkulu dalam menekan perkembangan covid-19. Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan new normal di pasar panorama Kota Bengkulu, peneliti mengadopsi teori Charles O Jones yang menjelaskan terdapat tiga aktivitas dalam implementasi kebijakan yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi (Charles O Jones, 1996:116). Permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan new normal di pasar panorama Kota Bengkulu tersebut yakni berkaitan dengan interpretasi dan aplikasi. Ditinjau pada aktivitas pertama berkaitan dengan struktur organisasi yang dibuat oleh pemerintah dalam mendukung jalannya new normal adalah dibuatnya satgas covid-19, yang bertujuan menjaga kedisiplinan penerapan new normal, mengontrol perkembangan kasus Covid-19. Pembentukan satgas ini dituangkan dalam Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bengkulu dimana didalamnya dilampirkan struktur organisasi satgas Covid-19 di Kota Bengkulu. Dinas kesehatan merupakan tim teknis atau pelaksana dari kebijakan new normal di pasar panorama Kota Bengkulu dan instansi lain seperti BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Dinas Sosial hingga Satpol pp dan Polisi sebagai penegak keamanan pelaksanaan program new normal tersebut.

Permasalahan yang peneliti temui dalam penerapan kebijakan new normal di pasar panorama Kota Bengkulu yakni berkaitan dengan interpretasi. Petunjuk pelaksanaan new normal

diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 hingga Surat Edaran (SE) dengan Nomor: 530/381/01.VI/D.Perindag/2020 tentang pemulihan aktivitas perdagangan yang dilakukan pada masa pandemi Covid- 19 dan New Normal. Permasalahannya yang terjadi adalah pemahaman masyarakat dan pelaksanaan kebijakan yang tidak selaras sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan ini mengakibatkan hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah satu pedagang di pasar panorama yang mengatakan:

“Virus Covid-19 ini hanya manipulasi dari pemerintah. Sakit sedikit dibilang terkena virus covid, padahal hanya flu biasa. Jadi saya tidak percaya dengan adanya virus ini. Orang gila saja yang sering berkeliaran diluar tidak ada yang terkena covid, padahal mereka makanpun tidak tau bersih atau tidak.” (Wawancara pra penelitian, tanggal 8 April 2021)

Dari hasil wawancara dari salah satu pedagang di atas dapat ditarik bahwa adanya perbedaan pemahaman atau pemaknaan terhadap pandemi covid-19 yang sedang merebak di tengah-tengah masyarakat, dimana masyarakat menganggap pandemi covid-19 hanyalah manipulasi belaka yang dibuat oleh pemerintah sehingga ia merasa tidak perlu mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti yang kita ketahui pemerintah menetapkan peraturan new normal merupakan salah satu langkah yang diambil untuk menekan perkembangan pandemi covid-19 yang semakin menyebar ditengah masyarakat. Perbedaan pemahaman masyarakat dengan pelaksanaan kebijakan ini menjadi salah satu masalah dalam penerapan new normal yang membuat pelaksanaan kebijakan new normal ini tidak maksimal di tengah masyarakat karena masyarakat merupakan sasaran dari kebijakan ini sebagai pelaksanaan dari kebijakan new normal di pasar panorama.

Permasalahan selanjutnya yang teridentifikasi dalam penerapan kebijakan new normal di pasar panorama yaitu berkaitan dengan aspek aplikasi. Untuk mendukung jalannya kebijakan new normal di pasar panorama, pemerintah telah menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini seperti tempat mencuci tangan, membagikan masker dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung jalannya kebijakan ini. Tetapi dalam aplikasinya terdapat permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat seperti yang dikatakan oleh Kepala UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu:

“Dikasi masker mereka menerimanya tapi tidak mau memakainya, alasannya sesak nafas dan sebagainya. Ada juga yang memakai waktu dikasi masker saja, setelah itu tidak mau memakai lagi.

Jadi susah mengontrol mereka untuk menggunakan masker, padahal itu untuk kepentingan mereka sendiri” (Wawancara pra penelitian, tanggal 8 April 2021)

Dari hasil wawancara di atas dapat kita tarik bahwa tidak adanya dukungan baik dari masyarakat pasar panorama dalam menerapkan kebijakan new normal, karena banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya Kepala UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu juga mengatakan:

“Fasilitas seperti tempat cuci tangan sudah disediakan di 4 titik di pasar panorama oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) tetapi masyarakat cenderung menyalahgunakan fasilitas tersebut untuk kepentingan pribadi seperti mencuci sayur, peralatan pasar dan sebagainya sehingga membuat tidak menyediakan lagi.” (Wawancara pra penelitian, tanggal 8 April 2021)

Adapun Konteks implementasi dalam aspek aplikasi merujuk pada Jones (1996:296) menyebutkan bahwa aplikasi merupakan ketentuan rutin yang ditetapkan dalam menjalankan suatu program sesuai dengan tujuan dari program itu sendiri. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek aplikasi ini merupakan aktivitas yang dilakukan secara rutin dalam mencapai tujuan dari kebijakan yang diharapkan. Dalam hal ini perlu kerjasama antara implementor dengan masyarakat sebagai sasaran dari pelaksanaan kebijakan new normal ini. Diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat karena tujuan dari kebijakan new normal ini ditujukan untuk menekan perkembangan pandemi covid-19 di tengah masyarakat pasar panorama yang bersangkutan pautan dengan kegiatan sehari-hari masyarakat.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut yang telah dimuat di atas yakni; Pertama, Permasalahan dari perbedaan pandangan masyarakat terhadap virus Covid-19 dengan pemerintah, dan Kedua, Permasalahan dari masyarakat dalam ketidakpatuhan terhadap kebijakan New normal yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Permasalahan-permasalahan tersebut yang menjadi alasan mengapa peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Kebijakan New Normal Dalam Menekan Perkembangan Klaster Covid-19 Di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu” yang dikaji dengan merujuk pada konsep implementasi kebijakan menurut Jones (1996:296) dengan mendasarkan tiga hal yakni; pengorganisasian, dilihat dari interpretasi dan melihat dari aplikasi dari kebijakan new normal di pasar panorama.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Aspek dalam penelitian ini mengadopsi teori Charles O Jones (1996:296), menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yakni organisasi, interpretasi dan aplikasi.

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam upaya mencari dan memahami data atau mencari informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini tidak hanya menggunakan satu teknik saja dalam melakukan penelitian di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

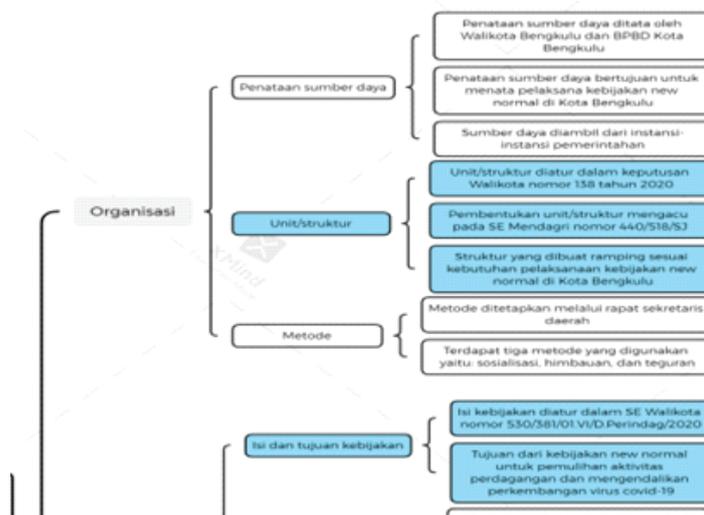
Dalam hal ini pengambilan informan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini merupakan teknik dimana pemilihan informan yaitu memilih orang yang memahami persoalan tentang pelaksanaan kebijakan new normal di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Informan yang diambil berjumlah 6 orang yang terbagi 1 dari pihak UPTD Pasar Panorma, 1 dari pihak Dinkes, 1 dari pihak BPBD dan 3 dari pedagang Pasar Panorama.

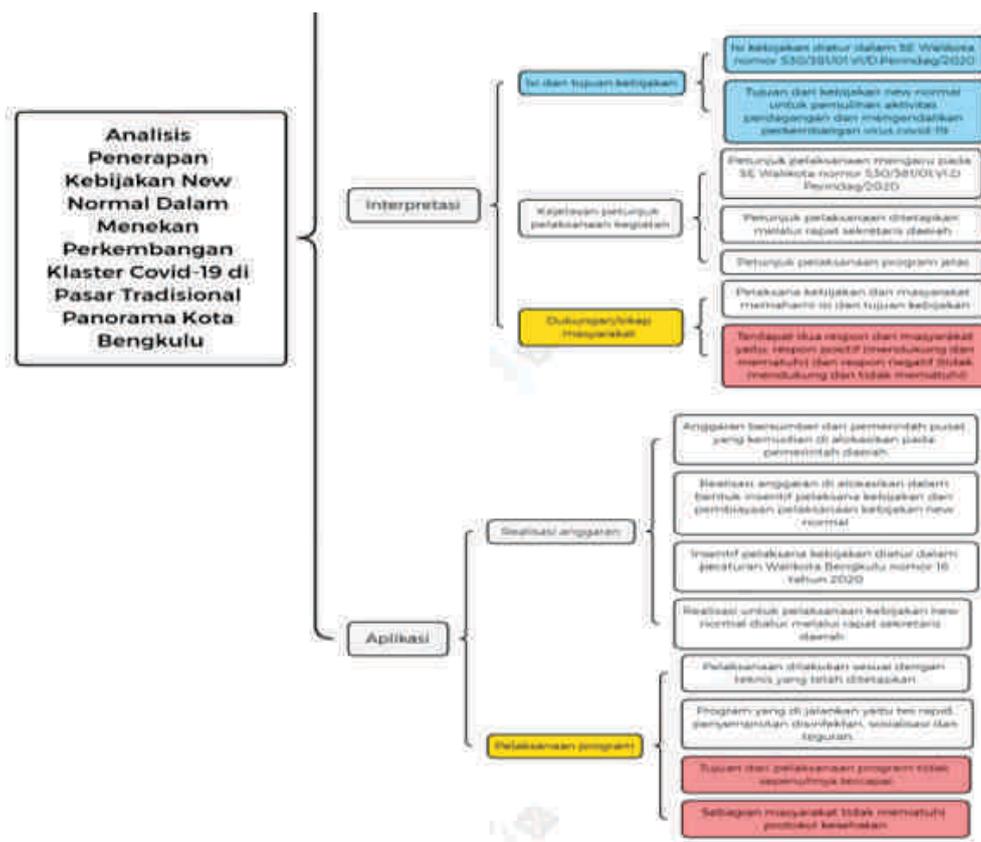
Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan tehnik menghubungkan data yang diperoleh peneliti pada masa sebelum, selama dan setelah kegiatan di lapangan (lokasi penelitian), sesuai teori dari Creswell, (2014:194) dengan tahapan yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclutions).

C. HASIL DAN PEMBAHAN

Untuk meneliti Analisis Penerapan Kebijakan New Normal Dalam Menekan Perkembangan Klaster Covid-19 Di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu, peneliti mengadopsi teori Charles O Jones (1996:296) yang menyebutkan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi. Berikut gambaran diagram hasil penelitian :

Gambar 3
Diagram Hasil Penelitian





Sumber : Olahan Penelitian, 2021

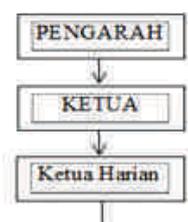
Gambar diagram di atas memaparkan hasil penelitian berkaitan Analisis Penerapan Kebijakan New Normal Dalam Menekan Perkembangan Klaster Covid-19 Di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu. Terdapat tiga aspek yang digunakan yaitu organisasi , interpretasi dan aplikasi yang merujuk pada teori implementasi kebijakan Jones (1996). Berdasarkan teori tersebut, implementasi kebijakan publik terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting. Aktivitas pertama adalah organisasi pelaksanaan kebijakan, yang mencakup penataan sumber daya, unit/struktur serta metode untuk menjadikan program terlaksana. Aktivitas kedua adalah interpretasi, yaitu tahapan penjabaran atau menafsirkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Aktivitas ketiga adalah aplikasi atau penerapan yaitu tahapan penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Di mana tahap ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan yang telah dirancang. Berkaitan dengan Analisis Penerapan Kebijakan New Normal Dalam Menekan Perkembangan Klaster Covid-19 Di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu melalui tiga aktivitas ini maka dapat diketahui bagaimana pelaksanaan kebijakan new normal terlaksana di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu. Berikut hasil penelitian

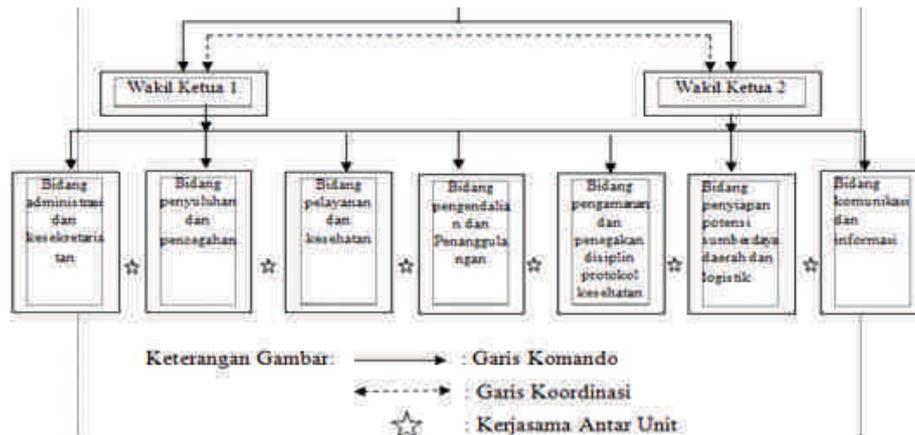
1. Pengorganisasian

Aktivitas pengorganisasian meliputi penataan sumber daya, unit/struktur serta metode untuk menjadikan program terlaksana. Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan new normal di Pasar Panorama Kota Bengkulu, pemerintah telah membentuk Satgas penanganan Covid-19 di Kota Bengkulu untuk merealisasikan kebijakan new normal yang telah ditetapkan. Organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Robbins, 1994:4). Penataan sumber daya untuk pembentukan struktur organisasi pelaksanaan kebijakan new normal di Kota Bengkulu ditetapkan melalui Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bengkulu. Dimana dalam penetapannya mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 di daerah yang mengatur tentang standar pembentukan struktur Satgas Penanganan COVID-19 provinsi dan kabupaten/kota. Struktur organisasi mendefinisikan pekerjaan dan tanggung jawab, aturan kerja dan hubungan serta jalur komunikasi (Mullins, 2013). Struktur dibuat bertujuan untuk menjalankan suatu kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan. Struktur organisasi secara jelas mampu memisahkan tanggung jawab dan wewenang anggotanya. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya (Edward III dalam Widodo, 2010:106).

Bentuk struktur pelaksanaan kebijakan new normal di Kota Bengkulu yang disebut dengan Satgas penanganan Covid-19 dibentuk oleh Walikota Bengkulu dengan BPBD Kota Bengkulu selaku sekretaris Satgas penanganan Covid-19 Kota Bengkulu melalui rapat Sekretaris Daerah yang setelahnya ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bengkulu. Struktur Satgas Penanganan dari gambar di atas merupakan bentuk organisasi lini/garis/komando. Pada bentuk organisasi lini/komando dikenal adanya unsur pimpinan dan unsur pelaksana. Pimpinan yang dimaksud merupakan pucuk pimpinan tunggal di struktur organisasi. Sedangkan pelaksana merupakan orang-orang atau unit yang terlibat langsung dalam pencapaian tujuan organisasi.

Gambar 4
Struktur Organisasi Satgas Covid-19





Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Bentuk struktur Satgas Penanganan Covid-19 lini/garis/komando dalam kenyataan lapangan berjalan dengan baik yaitu dalam pelaksanaannya adanya kesatuan komando yang terjamin dengan baik, disiplin pegawai tinggi dan mudah dipelihara, koordinasi lebih mudah dilaksanakan dan Garis kepemimpinan tegas, tidak simpang siur, karena pimpinan langsung berhubungan dengan bawahannya sehingga semua perintah dapat dimengerti dan dilaksanakan

Struktur Satgas penanganan Covid-19 Kota Bengkulu merupakan struktur yang ramping dimana dalam pembentukannya dibuat dengan cermat. Bidang-bidang atau unit-unit yang ditetapkan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kebijakan new normal di Kota Bengkulu sehingga unit-unit atau bidang-bidang yang dibutuhkan tidak sertakan yang akan membuat struktur menjadi gemuk dan tidak berfungsi secara efektif dan efisien.

2. Interpretasi

Aktivitas interpretasi adalah tahapan penjabaran atau menafsirkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional (Jones, 1996:323). Interpretasi merupakan usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan. Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan new normal di Pasar Panorama Kota Bengkulu, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Walikota Bengkulu dengan Nomor: 530/381/01.VI/D.Perindag/2020 tentang pemulihan aktivitas perdagangan yang dilakukan pada masa pandemi Covid- 19 dan New Normal. Kebijakan ini bertujuan untuk pemulihan aktivitas perdagangan yang dilakukan pada masa pandemi Covid- 19 dan New Normal sekaligus mengendalikan perkembangan virus covid-19 di tengah-tengah masyarakat. Berikut isi Surat Edaran (SE) Walikota Bengkulu dengan Nomor: 530/381/01.VI/D.Perindag/2020 tentang pemulihan aktivitas perdagangan yang dilakukan pada masa pandemi Covid- 19 dan New Normal :

a. Pasar Rakyat

1. Memastikan semua Pedagang, Pengelola Pasar dan Organ pendukungnya negative Covid-19 berdasarkan bukti hasil Tes PCR/Rapid Test yang difasilitasi Pemerintah Daerah, dengan menggunakan masker, face shield dan sarung tangan selama beraktivitas.
2. Pedagang yang berdagang di Pasar Rakyat diatur secara bergiliran dengan jarak antar pedagang minimal 1,5 meter.
3. Sebelum pasar dibuka pada pukul 06.00 s/d 11.00, dilakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh Pedagang Pengelola Pasar dan Organ Pendukungnya di bawah 37,3° C (sesuai ketentuan WHO).
4. Melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas.
5. Mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1,5 meter serta control suhu tubuh pengunjung di bawah 37,7° C (sesuai ketentuan WHO).
6. Di area pasar, disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan hand sanitizer serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi.
7. Menjaga kebersihan lokasi berjualan termasuk lapak, los dan kios sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan perdagangan.
8. Memelihara bersama kebersihan secara umum serta toilet umum, tempat pembuangan sampah, tempat parkir, lantai/selokan, dan tempat makan sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan perdagangan.
9. Menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah Pengunjung maksimal 30% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan.
10. Mengatur waktu pemasukan dan pengeluaran barang dagangan dari dan ke Pasar Rakyat dan Pemasok.
11. Mengoptimalkan ruangan terbuka-outdoor (tempat parkir dan sebagainya) untuk berjualan dalam rangka physical distancing, dengan mengatur jarak antar pedagang dalam rentang minimal 2 meter. (Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2020)

Proses implementasi melibatkan melibatkan interaksi banyak orang dengan kepentingan dan sekaligus merumuskan mekanisme untuk memberikan informasi kebijakan tersebut. Edwards III menjelaskan bahwa terdapat tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (Winarno, 2014:178). Persyaratan pertama tentang transmisi dalam komunikasi kebijakan adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada orang yang tepat sebelum keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah di diikuti. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Berkaitan dengan pelaksanaan new normal di Pasar Panorama Kota Bengkulu, Satagas penanganan Covid-19 memahami apa isi dan tujuan dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat

dari pelaksanaannya dimana tim Satgas Covid-19 mengetahui apa yang harus dilakukan agar tujuan kebijakan dapat tercapai dan siapa target sasaran kebijakan dengan menetapkan program-program penyemprotan disinfektan, tes rapid, sosialisasi serta himbauan tentang kebijakan new normal hingga teguran yang dilakukan kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Kedua mengenai konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Dalam merealisasikan kebijakan new normal di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Tim Satgas Covid-19 menetapkan teknis pelaksana dari program yang akan dilakukan di tengah masyarakat. Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat Sekretaris daerah, dimana melalui rapat tersebut ditetapkan siapa saja yang terlibat, waktu pelaksana, target sasaran, hingga teknis pelaksanaan dari program-program tersebut sehingga dalam pelaksanaannya konsisten dan jelas tidak berubah-ubah sehingga apa yang dimaksudkan dapat tersampaikan. Ketiga mengenai kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana apa yang diharapkan, maka arahan pelaksanaan kepada pelaksana kebijakan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas. Berkaitan dengan pelaksanaan new normal di Pasar Panorama Kota Bengkulu arahan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat dikomunikasikan dengan baik dan jelas melalui sosialisasi serta himbauan seperti berkaitan dengan bagaimana pelaksanaannya hingga tujuannya sehingga masyarakat sebagai target sasaran dapat memahami maksud dan tujuan dari kebijakan new normal di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Ditinjau dari aktivitas interpretasi dalam pelaksanaan new normal di Pasar Panorama Kota Bengkulu baik dari pelaksana kebijakan dan masyarakat Pasar Panorama memahami maksud dan tujuan dari kebijakan new normal di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan terhadap masyarakat yang sesuai dengan yang telah direncanakan. Hanya saja yang menjadi masalah respon yang diberikan oleh masyarakat dalam menerima pemahan tersebut yang berbeda-beda. Terdapat masyarakat yang menerima dan terdapat pula sebagai dari mereka yang mengabaikan meskipun mereka mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan itu sendiri dengan alasan-alasan pribadi dimana hal ini akan mempengaruhi mereka dalam berperilaku termasuk dalam memanggapi kebijakan new normal di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

3. Aplikasi

Aplikasi adalah penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan (Jones, 1996). Pada tahap aplikasi rencana proses implementasi kebijakan diimplementasikan ke dalam realitas nyata. Di mana tahap ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan yang telah dirancang. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Anderson bahwa kebijakan terdiri dari serangkaian

tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (Islamy, 2009: 17). Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan new normal di Pasar Panorama Kota Bengkulu, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Walikota Bengkulu dengan Nomor: 530/381/01.VI/D.Perindag/2020 tentang pemulihan aktivitas perdagangan yang dilakukan pada masa pandemi Covid- 19 dan New Normal. Surat edaran tersebut merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur atau memberikan batasan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas di Pasar Tradisional. Dalam peraturan tersebut terdapat apa saja yang harus dipatuhi oleh masyarakat hingga apa saja batasan yang harus dilakukan saat beraktivitas di Pasar Tradisional.

Terdapat empat macam tipe kebijakan yaitu tipe kebijakan domestik tipe kebijakan distributive, tipe kebijakan kompetitif regulatif, tipe kebijakan protectiv regulatif dan tipe kebijakan redistributive. Kebijakan new normal di Pasar Panorama Kota Bengkulu merupakan tipe kebijakan kebijakan protectiv regulatif dimana kebijakan atau program-program yang bersifat protektif dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk melindungi masyarakat dengan mengatur apa yang boleh dan tidak boleh. Hal ini dapat dilihat dari isi kebijakan yang mengatur kegiatan masyarakat saat melakukan aktivitas di Pasar Tradisional. Kebijakan ini bertujuan untuk pemulihan aktivitas perdagangan yang dilakukan pada masa pandemi Covid- 19 dan New Normal sekaligus mengendalikan perkembangan virus covid-19 di tengah-tengah masyarakat. Untuk merealisasikan kebijakan ini pemerintah melaksanakan sosialisasi, himbauan serta teguran bagi masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Teguran lisan yang diterapkan oleh Satgas penanganan Covid-19 Kota Bengkulu merupakan cara yang ditetapkan agar masyarakat dapat menyadari kesalahan terhadap pelanggaran dan tidak mengulangnya kembali. Dalam pelaksanaannya teguran lisan yang diterapkan oleh Satgas penanganan Covid-19 Kota Bengkulu tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dari ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang masih sama. Masyarakat Pasar Panorama merupakan kelompok sasaran pelaksanaan new normal di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Kelompok sasaran menjadi penentu apakah kebijakan yang telah dibuat akan berhasil atau tidak, hal ini dikarenakan maksud dari suatu kebijakan yang dibuat tersebut yaitu untuk merespons atau menanggulangi permasalahan yang ada dalam kelompok sasaran tersebut. Itulah mengapa salah satu indikator tercapainya tujuan dari kebijakan new normal di Pasar Panorama Kota Bengkulu ini adalah masyarakat yang mau menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari di Pasar Panorama. Tujuan tersebut tidak sepenuhnya tercapai dilihat dari sebagian besar masyarakat masih mengabaikan protokol kesehatan.

Menurut Hartono menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan patuh terhadap orang lain, apabila seseorang tersebut memiliki tiga kriteria kepatuhan yang terkait dengan sikap dan tingkah laku patuh (Hartono;2006) Berikut kriteria-kriteria tersebut adalah kepatuhan yakni pertama, mempercayai. Kepercayaan terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkutan. Kedua menerima. Menerima dengan sepenuh hati perintah atau permintaan yang diajukan oleh orang lain. Ketiga, melakukan. Melakukan isi perintah atau permintaan dari orang lain secara sadar. Dari ketiga kriteria tersebut apabila terpenuhi maka suatu kepatuhan dapat terpenuhi. Ditinjau dari teori tersebut kepatuhan masyarakat Pasar Panorama Kota Bengkulu tidak sesuai sebagaimana mestinya hal tersebut dapat dijelaskan pertama ditinjau dari kriteria mempercayai yaitu sebagian dari masyarakat yang tidak mematuhi peraturan/protokol kesehatan tidak mempercayai kenapa peraturan/protokol kesehatan harus dipatuhi. Maksud dari kenapa harus dipatuhi adalah masyarakat tidak mempercayai akan bahaya virus Covid-19 sehingga mereka cenderung mengabaikan apa yang sudah digaungkan oleh pemerintah. Kedua ditinjau dari kriteria meima kebijakan peraturan/protokol kesehatan dimana masyarakat yang tidak mematuhi peraturan/protokol kesehatan tidak sepenuhnya menerima dengan baik sehingga hal tersebut mempengaruhi mereka dalam berperilaku dengan tidak mematuhi peraturan tersebut. Ketiga, ditinjau dari kriteria melakukan dimana dengan tidak terpenuhi dua kriteria diatas maka akan menciptakan ketidakpatuhan begitun sebaliknya.

Gambar 5
Suasana Aktivitas Masyarakat Panorama



Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Gambar diatas menunjukkan suasana aktivitas masyarakat dimana terdapat sebagian dari masyarakat tidak menerapkan peraturan/protokol kesehatan. Terdapat dua alasan masyarakat tidak mematuhi peraturan protokol kesehatan yaitu pertama perbedaan pemahaman tentang covid-19 yang menganggap virus Covid-19 bukanlah hal yang harus diwaspadai penyebarannya dan kedua masyarakat yang tidak ingin repot dengan menerapkan protokol kesehatan dengan harus menggunakan masker hingga menjaga jarak. Inilah yang menjadi alasan mengapa tujuan dari pelaksanaan kebijakan new normal tidak sepenuhnya tercapai. Hal ini juga disebabkan oleh ketidak

tegasan pemerintah dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar sehingga masyarakat tidak merasa jera dan tetap mengabaikan himbauan-himbauan pelaksana kebijakan.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pelaksanaan kebijakan new normal di pasar Panorama Kota Bengkulu sepenuhnya belum berjalan optimal. Dilihat dari sikap dan respon masyarakat yang masih banyak tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para pelaksana kebijakan agar kebijakan new normal di Pasar Panorama Kota Bengkulu bisa terealisasi secara optimal dan memberikan dampak yang seharusnya. Dapat kita lihat bahwa banyak masyarakat yang masih belum mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menjadi kendala yang krusial dimana masyarakat merupakan target atau kelompok sasaran pelaksanaan kebijakan new normal. Ketidapatuhan tersebut berasal dari perbedaan masyarakat dalam menerima kebijakan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya masyarakat mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan yang telah disampaikan oleh pelaksana kebijakan melalui program-program yang telah dijalankan. Selain itu hal yang menyebabkan adanya ketidakpatuhan dari masyarakat adalah kurang tegasnya pelaksana kebijakan dalam memberikan teguran yang seharusnya berupa sanksi yang dapat membuat masyarakat tidak kembali mengabaikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Walaupun begitu masih ada diantara mereka yang masih peduli dengan hal tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya terdapat dua hal yang menyebabkan tidak berjalan optimalnya kebijakan new normal di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Pertama, perbedaan penerimaan kebijakan yang telah digaungkan oleh pelaksana kebijakan sehingga terdapat sebagian masyarakat yang memberi respon positif yaitu mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dan masyarakat yang memberikan respon negatif yaitu tidak mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. Cara seseorang menerima suatu kebijakan akan mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. Itulah mengapa masyarakat yang menerima kebijakan yang telah ditetapkan akan bertindak dengan tidak mematuhi kebijakan tersebut. Kedua, kurang efektifnya metode yang digunakan oleh pemerintah yaitu metode teguran lisan dimana tidak memberi efek jera terhadap masyarakat yang melanggar protokol yang telah ditetapkan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agung Sunarto dan Agung Hartono. 2006. *Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya.

Budiharto, Widodo. 2010. *Robotika – Teori dan Implementasinya*. Yogyakarta : Penerbit Andi

Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.

Hayat, Hayat. (2018). *Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Negeri Malang.

Islamy, Irfan, 2009. *Prinsi-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Jones, Charles. O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kadji, Yulianto. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Pres s.

Kasmad, Rulinawaty. (2018). *Studi Iimplementasi Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Terbuka.

Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn , 1975. *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework dalam Administration and Society 6*. London : SAGE

Mullins, John W dan Walker Jr, Orville C. 2013. *Marketing Management: A Strategic Decision-Making Approach*, 8th Edition, McGraw-Hill International Edition.

Robbins, Stephen P., 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi, Alih Bahasa Jusuf Udaya*. Jakarta : Arcan.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi, 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal :

Harsin, Abdul. (2015). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal Implementasi Kebijakan, Vol. 5, No. 1/ Juni 2018: 1 – 17

Juanda Puspita Mega. (2019). *Implementasi Kebijakan Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung*. Jurnal Implementasi Kebijakan. Universitas Islam Bandung.

Peraturan Perundangan :

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 *tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19*

Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 138 Tahun 2020 *Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bengkulu*

Peraturan Gubernur (Pergub) No 22 Tahun 2020 *Tentang Meningkatkan Kedisiplinan Masyarakat Terhadap Kebijakan Protokol Kesehatan*.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota Nomor 440/5184/SJ *tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 di Daerah*

Surat Edaran (Se) Dengan Nomor : 530/381/01.Vi/D.Perindag/2020 *Tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan Yang Dilakukan Pada Masa Pandemi Covid- 19 Dan New Normal*



Web :

<https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19> Diambil dari <https://bengkuluprov.go.id/> diakses tanggal 14 April 2021

<https://covid19.bengkuluprov.go.id/databengkulu> Diambil dari <https://covid19.bengkuluprov.go.id/databengkulu> diakses tanggal 14 April 2021

<https://bengkuluprov.go.id/> Diambil dari <https://covid19.bengkuluprov.go.id/databengkulu> <https://bengkuluprov.go.id/> diakses tanggal 14 April 2021

<https://www.kemendagri.go.id> (2020) Surat Edaran Pembentukan Satgas Covid-19 Daerah From <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/29475/kemendagri-rilis-surat-edaran-pembentukan-satgas-covid-19-daerah> diakses tanggal 20 September 2021